

## Upaya Diplomasi Maritim Koersif Amerika Serikat terhadap Iran di Selat Hormuz

Ita Istiqomah<sup>1</sup>, Dian Mutmainah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Kota Malang, Indonesia

Email: <sup>1</sup>itaistiqomah@student.ub.ac.id, <sup>2</sup>d.mutmainah@ub.ac.id

### Abstrak

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran Internasional bagi komoditas minyak dan gas dunia. Penarikan diri secara sepihak oleh Amerika Serikat dari kesepakatan *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) tahun 2018 dan memberlakukan kembali sanksi ekonomi yang dilakukan dengan *maximum pressure*. Iran memberikan respons dengan memanfaatkan peluang posisi strategis Selat Hormuz sebagai ancaman melakukan penutupan pelayaran Internasional. Adanya kondisi bumerang bagi Amerika Serikat untuk kembali memberikan perilaku baru dengan Diplomasi Maritim Koersif guna menjaga kepentingan perdagangan minyak AS dan keamanan pelayaran saat transit di Selat Hormuz. Amerika Serikat melalui *Department of Defense* melakukan operasi *Freedom of Navigation* untuk mencapai diplomasi maritim. Penelitian ini menggunakan tipologi diplomasi maritim koersif milik Christian Le Miere yang dianalisis melalui tiga indikator: penggunaan ancaman (*use of threat*), peran aktor negara atau non-negara (*state or non-state actor*), serta tujuan politik (*political goals*) untuk memastikan kebebasan navigasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dari artikel jurnal, pemberitaan media, dan dokumen resmi pemerintah, termasuk laporan Departemen Pertahanan AS dan UNCLOS.

**Kata Kunci:** Diplomasi Maritim Koersif, Selat Hormuz, Operasi Kebebasan Navigasi.

### Abstract

*The Strait of Hormuz is one of the international shipping lanes for world oil and gas commodities. The unilateral withdrawal by the United States from the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) agreement in 2018 and re-imposed economic sanctions with maximum pressure. Iran responded by taking advantage of the strategic position of the Strait of Hormuz as a threat to close international shipping. The boomerang conditions for the United States to return to new behavior with Coercive Maritime Diplomacy to protect US oil trade interests and shipping security during transit in the Strait of Hormuz. The United States through the Department of Defense conducted Freedom of Navigation operations to achieve maritime diplomacy. This study uses Christian Le Miere's typology of coercive maritime diplomacy which is analyzed through three indicators: use of threats, the role of state or non-state actors, and political goals to ensure freedom of navigation. This study uses a qualitative method with data collection through literature studies from journal articles, media coverage, and official government documents, including reports from the US Department of Defense and UNCLOS.*

**Keywords:** Coercive Maritime Diplomacy, Strait of Hormuz, Freedom of Operation Navigation.

### PENDAHULUAN

Laut menjadi suatu hal yang sangat penting bagi perkembangan manusia, karena keberadaannya yang mencakup hampir tiga perempat permukaan Bumi dan memiliki sumber daya hayati, energi, dan mineral yang sangat besar (Gorshkov, 1977). Hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Sinai (2004) dimana ia menyatakan bahwa laut telah menjadi elemen penting dalam transportasi global, dengan sekitar 46.000 kapal dan 4.000 pelabuhan membentuk sistem transportasi laut global. Selain itu, kapal kargo yang juga merupakan salah satu aspek paling krusial dalam perdagangan global, dengan mayoritas perdagangan

dunia sekitar 80% dilakukan melalui jalur laut. Hal ini terlihat adanya peningkatan volume perdagangan melalui sektor maritim global yang mencapai 12,3 miliar ton pada tahun 2023. Kenaikan ini menandai adanya pemulihan pasca pandemi pada tahun-tahun sebelumnya (UNCTAD, 2024). Karena perannya yang strategis, laut menjadi objek kepentingan banyak negara yang berlomba-lomba untuk memanfaatkannya demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi geopolitik mereka.

Akar permasalahan konflik AS dengan Iran berawal pada ketidakpercayaan historis yang mendalam sejak Revolusi Iran 1979 melalui insiden *hostage crisis* yang mengubah relasi baik yang semula menjadi aliansi pada tahun 1953-1979 menjadi renggang akibat peristiwa tersebut. Kudeta yang terjadi terhadap pemerintahan Mohammad Reza Shah Pahlevi serta insiden mahasiswa Iran menduduki Kedutaan Besar AS di Teheran dengan menawan 66 warganya menjadi momentum renggangnya hubungan antar kedua negara hingga sekarang (Rahim, 2020). Konflik yang berkepanjangan diperparah dengan penarikan diri sepihak AS dalam perjanjian nuklir JCPOA pada 2018. Keluarnya AS dilatarbelakangi oleh beberapa hal, seperti yang tertulis dalam *Fact Sheet The White House* (2018), uang yang diberikan oleh JCPOA disalahgunakan oleh Iran serta adanya pemalsuan mata uang untuk mendorong operasi Pasukan Quds milik IRGC. Penarikan ini segera diikuti oleh penerapan kembali sanksi ekonomi dengan tujuan memberikan *maximum pressure* pada Iran.

Pada 29 April 2019, melalui pernyataan resmi terhadap Kuwait News Agency, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Mohammad Bagheri, mengancam akan menutup Selat Hormuz sebagai bentuk respon dari sanksi AS *Maximum pressure* jika penerapan sanksi ekonomi AS terus meningkat (JNS, 2019). Sanksi yang diberikan AS tak lain merupakan bentuk keluarnya AS dari JCPOA pada tahun 2018 agar Iran mau membuat kesepakatan baru terkait dengan nuklir (Halil, 2020). Hal ini menjadi ketegangan dunia sebab Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran distribusi minyak terbesar dibanding selat-selat Internasional lainnya. Hal ini terlihat, pada sepanjang tahun 2016 hingga 2019, posisi kuat dipegang oleh Selat Hormuz dengan menyentuh angka 17 hingga 18.5 barel per harinya. Lokasi strategis ini dianggap menjadi peluang ancaman bagi Iran sebagai alat tawar menawar AS untuk menghentikan sanksi ekonominya (U.S Energy Information Administration, 2019).

Location	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Strait of Hormuz	17.0	16.8	16.6	16.9	17.0	18.5
Strait of Malacca	14.5	15.1	15.4	15.5	15.5	16.0
Suez Canal and SUMED Pipeline	3.8	4.5	4.6	5.2	5.4	5.5
Bab el-Mandeb	3.3	3.6	3.8	4.3	4.7	4.8
Danish Straits	3.0	3.3	3.1	3.0	3.2	3.2
Turkish Straits	2.9	2.7	2.6	2.6	2.4	2.4
Panama Canal	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	0.9
Cape of Good Hope	4.7	5.4	5.1	4.9	5.1	5.8
World maritime oil trade	55.5	56.4	56.5	56.4	58.9	n/a
World total oil supply	88.8	90.8	91.3	93.8	96.7	97.2

**Gambar 1.** Volume minyak dan petroleum melalui laut, 2011-2016 (juta barel per hari)

Perilaku Iran yang bersikukuh untuk menolak dialog dengan AS membuat lontaran ancaman penutupan Selat Hormuz dan gangguan kapal semakin nampak nyata. Penutupan ancaman itu dikarenakan, AS menuntut agar para pembeli minyak Iran seperti India, Tiongkok, dan Turki untuk berhenti membeli minyak pada bulan Mei atau menghadapi sanksi dalam upaya untuk menjadikan ekspor minyak Iran menjadi nol (BBC News, 2019). Pernyataan serupa diulanginya lagi, menekankan bahwa jika minyak Iran tidak dapat melintas, maka minyak negara lain juga tidak akan bisa melewati Selat Hormuz, kecuali jika permusuhan mencapai tingkat yang tidak dapat dihindari.

*“We are not after closing the Strait of Hormuz, but if the hostility of enemies increase, we will be able to do so. Also, if our oil does not go through the strait, other countries’ oil will certainly not cross the strait, too,”* (Mohammad Bagheri, Chief of staff of Iran’s armed forces, 2019)

Menanggapi respon Iran yang akan menutup Selat Hormuz, juru bicara Komando Pusat Angkatan Laut AS memperingatkan ancaman penutupan jalur perairan tersebut akan berdampak pada komunitas internasional dan merusak arus perdagangan bebas.

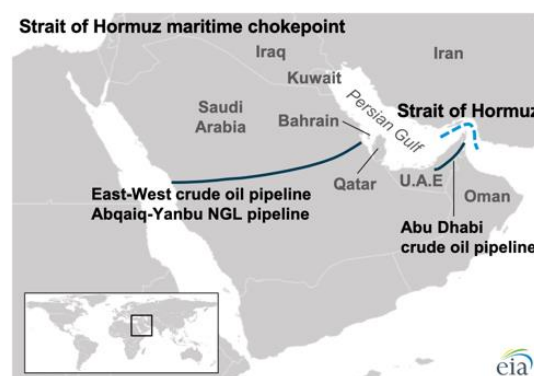
*“The US, along with our allies and partners, is committed to freedom of navigation and remains well positioned and postured to preserve the free flow of commerce, and we are prepared to respond to any acts of aggression”* (Letnan Chloe Morgan kepada kantor berita Reuters dalam sebuah pernyataan melalui email, 2019).

Rezim navigasi dalam UNCLOS merupakan sebuah kompromi terbaik antara kepentingan negara-negara dunia, baik negara pesisir, selat, kepulauan, dan negara maritim maju, yang memungkinkan terjaminnya hak lintas navigasi serta mendorong ketertiban hukum, perdamaian, dan kerja sama internasional dalam pengelolaan perairan (Rothwell & Bateman, 2000). Kebebasan navigasi atau juga dikenal dengan *'freedom of navigation'* adalah salah satu prinsip hukum penting dalam UNCLOS. Hal ini juga menjadi pedoman atas hak, kepentingan, dan kewajiban setiap negara, baik yang berada di pesisir maupun yang terkandung daratan (Tendulkar, 2023). Freedom of Navigation ini awalnya muncul dari pemikiran bangsa barat secara spesifiknya dari karya ahli hukum Belanda abad ke-17, Hugo Grotius, yang berpendapat bahwa lautan dunia seharusnya dianggap bebas, bukan dimiliki oleh negara (Etzioni, 2016). Secara keseluruhan, prinsip kebebasan navigasi ini mencerminkan pentingnya pengelolaan bersama perairan internasional yang adil dan berkelanjutan, yang mendukung hubungan antarnegara, perdamaian, dan perkembangan ekonomi global.

Setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat menjalankan program untuk melindungi hak kebebasan navigasi internasional. Program ini menanggapi klaim maritim bermasalah, seperti klaim perairan bersejarah yang tidak diakui, garis dasar yang salah, dan tuntutan laut teritorial berlebihan yang membatasi hak kapal militer dan komersial untuk melintas (Aceves, 1993). Hawkins (1998) juga berpendapat bahwa Amerika Serikat memiliki posisi untuk memberikan perlindungan, mengingat banyaknya armada dagang dunia yang tidak dapat melindungi dirinya sendiri, yang menjadi dorongan bagi pemilik kapal untuk bekerja sama dengan AS saat menghadapi bahaya. Program Kebebasan Navigasi (FON) AS dimulai pada tahun 1979 di bawah pemerintahan Carter, dengan tujuan untuk mengatur kegiatan diplomatik dan militer guna menentang klaim maritim yang berlebihan dari negara lain dan mendorong mereka untuk menyesuaikan klaim mereka dengan pandangan hukum internasional versi AS. Program ini kemudian ditegaskan kembali pada tahun 1983 oleh pemerintahan Reagan dan terus dilanjutkan oleh pemerintahan-pemerintahan berikutnya.

Kepentingan yang mendasari adanya FON ini untuk mencapai kepentingan nasional AS dengan meminimalisir adanya bentuk kekerasan terhadap kejahatan maritim. *International Maritime Bureau* (IMB, 2024) selaku lembaga yang memberikan laporan secara berkala menyoroti beberapa insiden maritim seperti halnya pembajakan dan perampokan bersenjata yang mengalami fluktuasi. Tercatat pada tahun 2022 terdapat 115 insiden tingkat kekerasan yang dihadapi awak kapal, kemudian mengalami peningkatan menjadi 120 insiden pada 2023 dan kembali menurun menjadi 116 insiden pada tahun 2024. Penyanderaan terhadap awak kapal juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Data IMB menunjukkan terdapat 41 korban pada tahun 2022 yang kemudian meningkat menjadi 73 korban dan ditutup dengan lonjakan yang cukup tinggi pada tahun 2024 sebanyak 126 korban. Kekerasan ini terjadi pada wilayah laut yang berpotensi mengalami ancaman, seperti Selat Malaka, Selat Hormuz, Terusan Suez, Cape of Good, Kanal Panama hingga Selat Turkish.

*Freedom of Navigation Operation* di bawah kendali *Department of Defense United States* memiliki beberapa fokus operasi pada setiap tahunnya. Merujuk ke data yang dipublikasikan pada website resmi *US Department of Defense* (2019), tercatat FON menghadapi 22 *claimants* atau negara yang melakukan klaim wilayah laut tertentu karena dianggap merupakan bagian dari kedaulatan mereka pada tahun 2019. Beberapa negara di antaranya adalah Kamboja, China, India, Vietnam hingga Iran. Selat Hormuz yang berada di Iran menjadi jalur pelayaran perdagangan yang disorot karena menjadi satu-satunya jalur laut perdagangan untuk negara-negara penghasil minyak yang tergabung dalam OPEC yang dilansir melalui data OPEC terdapat 51,2% cadangan minyak dunia yang terdapat pada wilayah Teluk Persia dan Iran menyumbang 33,9% cadangan gas dunia pada 2018 (Jacob D, 2021). Selat Hormuz sendiri terletak di antara Teluk Oman dan Teluk Persia dengan lebar hanya 21 mil atau 33 km. Sempitnya Selat Hormuz tersebut hanya bisa dilewati jalur pelayaran selebar dua mil atau tiga km di kedua arahnya (Ghaddar, 2023).



Gambar 2. Titik Rawan Maritim Selat Hormuz

Iran menjadi salah satu fokus dalam operasi FON karena banyaknya kekerasan yang terjadi di lintas transit sejak keluarnya Amerika Serikat dari JCPOA. Penandatanganan JCPOA pada tahun 2015 sempat membuka potensi perbaikan hubungan. Namun, keputusan AS untuk secara sepihak menarik diri dari JCPOA pada Mei 2018 dan menerapkan kembali sanksi ekonomi, secara drastis mengubah lanskap strategis. Tercatat pada tahun 2019, adanya sabotase terhadap kapal tanker milik Saudi Arabia, Norwegia dan Emirat pada Mei. Pada bulan Juni 2019, terdapat serangan kapal tanker yang berbendera Kepulauan Marshall dan Panama mengalami kebakaran yang diduga merupakan ulah dari IRGC. Di bulan yang sama, Iran menembak jatuh drone milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang diduga telah melanggar wilayah udara Iran. Upaya gangguan terus berlanjut hingga bulan Juli, terdapat Kapal Iran milik IRCGN yang berusaha menghalangi perjalanan kapal tanker British di Selat Hormuz.

Amerika Serikat memiliki urgensi tinggi untuk mempertahankan operasi *Freedom of Navigation* di Selat Hormuz karena wilayah tersebut kerap menjadi titik ketegangan akibat tindakan kekerasan dari Iran terhadap kapal-kapal internasional yang melewati *transit passage*. Selat yang digunakan untuk melakukan navigasi internasional antara ZEE dengan laut lepas lainnya yang merupakan *transit passage*, termasuk Selat Hormuz. Pada pasal 38 UNCLOS, semua transportasi memiliki hak lintas transit yang tidak boleh dihalangi dan adanya penerapan kebebasan navigasi. Melalui FON, AS berupaya memastikan bahwa Selat Hormuz tetap menjadi perairan internasional yang bebas diakses tanpa hambatan, sebagai bagian dari komitmennya terhadap hukum laut internasional dan penolakan terhadap dominasi oleh negara mana pun (U.S Department of Defense, 2017). Selain itu, AS berupaya untuk mencapai kekuatan keamanan yang stabil di jalur pelayaran internasional dan kepentingan ekonomi dalam perdagangan minyak di Selat Hormuz. Sebagai jalur laut strategis yang dilalui oleh sejumlah besar perdagangan minyak dunia, kebebasan navigasi di selat ini harus dijaga dari segala bentuk intimidasi militer atau pemaksaan sepihak yang dapat mengancam stabilitas regional dan keamanan maritim global.

Urgensi penelitian ini menitikberatkan pada penerapan sanksi ekonomi AS terhadap Iran untuk melemahkan perekonomian negaranya menjadi bumerang bagi AS. Kebijakan penekanan maksimum yang dilakukan oleh AS membuat Iran memanfaatkan peluang strategis dalam mengancam penutupan Selat Hormuz yang berdampak pada keamanan minyak global. Efek yang ditimbulkan dari peristiwa ini mendorong AS untuk menggunakan upaya diplomasi maritim koersif dengan mengerahkan armada laut serta kapal induk ke Selat Hormuz sebagai bentuk respon dari ancaman Iran. Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis respon peristiwa, di mana kegagalan tekanan dalam sanksi ekonomi AS terhadap Iran menimbulkan ancaman dari Iran sehingga mendorong AS menggunakan upaya diplomasi maritim koersif untuk mengelola konsekuensi yang ditimbulkan.

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis secara mendalam terkait dengan upaya dari Amerika Serikat dalam diplomasi maritim koersif melalui operasi *Freedom of Navigation* di Selat Hormuz pada periode tahun 2019 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual milik Christian Le Miere untuk melihat implementasi dari FON yang dilakukan oleh Department of Defense AS. Tipologi yang digunakan melalui diplomasi maritim koersif dengan menganalisis ketiga indikator yaitu penggunaan ancaman, peran aktor negara atau non negara yang terlibat, serta tujuan politik yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Iran. Upaya diplomasi maritim koersif dari FON ditujukan untuk menjaga akses perdagangan minyak dunia di Selat Hormuz serta meminimalisir gangguan yang dilakukan oleh Iran di selat tersebut.

### **Kerangka Konseptual**

Diplomasi telah lama menjadi cara utama dalam mengelola hubungan antarnegara. Secara umum, diplomasi dipahami sebagai upaya suatu negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya di tingkat internasional (Holsti, 1984). Diplomasi maritim sendiri merupakan salah satu bentuk pengelolaan hubungan internasional yang dilakukan melalui wewenang kemaritiman. Diplomasi maritim tidak hanya melibatkan aktor negara dan militer saja, aktor paramiliter juga dapat terlibat. Diplomasi maritim bukanlah sekedar penggunaan diplomasi tradisional yang berkaitan dengan isu-isu maritim seperti negosiasi perjanjian batas laut suatu negara ataupun kuota penangkapan ikan, tetapi juga mencakup pemanfaatan secara aktif pada aset-aset maritim.

Diplomasi maritim bisa diinterpretasikan ke dalam dua cara, Pertama, penggunaan berbagai instrumen kebijakan maritim seperti Angkatan Laut dan *Coast Guard* atau Penjaga Pantai untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri. Tujuan yang dibangun sesuai dengan kepentingan masing-masing negara, seperti membangun *prestige*, membangun kerjasama atau menekan lawan dalam mengubah arah kebijakan. Kedua, merupakan penggunaan instrumen diplomasi tradisional yaitu melalui diplomat untuk menangani dan menyelesaikan masalah maritim, seperti penetapan batas landas kontinen atau sengketa ZEE. Sebagian besar studi yang berkaitan dengan diplomasi maritim akan berfokus pada cara yang pertama dengan menggunakan aset maritim untuk mencapai tujuan tertentu (Sugiharto, 2021).

Diplomasi yang dimaksud Le Miere merupakan upaya diplomasi melalui aset maritim dengan penggunaan kapal maupun kemampuan angkatan laut yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Dapat dilihat bahwa diplomasi maritim mengarah pada bagaimana memproyeksikan kekuatan maritim dan angkatan laut untuk mencapai tujuan diplomatik suatu negara yang disesuaikan dengan *national interest* masing-masing negara (Le Mière, 2014). Lebih lanjut Le Mière juga menjelaskan bahwa diplomasi maritim berbeda dengan *gunboat diplomacy* yang hanya melibatkan kapal perang dan aktor militer. Sejalan dengan yang disampaikan Griffin dalam Riana & Sudirman (2016) diplomasi maritim tidak memiliki definisi yang spesifik, namun yang jelas, diplomasi maritim berbeda dengan diplomasi kapal perang (*gunboat diplomacy*) dan juga diplomasi angkatan laut (*naval diplomacy*).

Sebagai perbandingan, *gunboat diplomacy* merupakan bentuk diplomasi yang dikenal sebagai upaya menekan pemerintah untuk memberikan suatu pengaruh yang tak diinginkan pada pemerintah lain (Cable, 2016). Dalam tulisan terdahulunya Cable (1994) menjelaskan cara utama dalam *gunboat diplomacy* adalah penggunaan atau ancaman penggunaan kekuatan angkatan laut. Secara khusus, diplomasi kapal perang dapat dimaksudkan sebagai tindakan agresi atau pembelaan diri. Sedangkan *naval diplomacy* tidak hanya soal upaya koersif saja, tetapi juga mencakup banyak kegiatan non-militer seperti bantuan kemanusiaan, membangun kerja sama, dan menjaga kehadiran di luar negeri. Intinya, tentang apa yang benar-benar dilakukan oleh angkatan laut, bukan hanya apa yang mereka latih, meskipun hal ini jarang dibahas oleh para ahli (Rowlands, 2018).

Widen (2011) menjelaskan bahwa *naval diplomacy* memiliki makna yang lebih luas dan netral karena mencakup semua bentuk penggunaan kekuatan laut untuk kepentingan politik, sedangkan *gunboat diplomacy* bersifat sempit dan terbebani oleh sejarah kolonial abad ke-19. Ia juga menjelaskan bahwa *gunboat diplomacy* sebenarnya merupakan bentuk diplomasi yang lebih agresif dan ofensif, biasanya dilakukan oleh negara besar terhadap negara yang lebih lemah di wilayah perairannya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan terkait perbedaan tiga bentuk diplomasi diatas, yakni *gunboat diplomacy* yang berfokus pada penggunaan kekuatan militer untuk memaksa lawan dan cenderung ofensif, lalu *naval diplomacy* yang menekankan keterlibatan angkatan laut sebagai aktor utama dalam proses diplomasi, sementara *maritime diplomacy* dalam cakupan kerjasama maritim yang lebih luas untuk diplomasi dan upayanya untuk menjaga kestabilan perairan internasional.

Lebih jauh, Le Mière menjelaskan bahwa setidaknya terdapat tiga tipologi diplomasi maritim. Yang pertama dalam tipe diplomasi maritim kooperatif yang didalamnya melibatkan kerja sama antarnegara melalui pertukaran informasi, latihan bersama, dan bantuan kemanusiaan, yang bertujuan membangun hubungan dan memperkuat keamanan maritim. Indikator dalam diplomasi maritim kooperatif meliputi *cooperative willingly*, *peaceful activities* dan *share common political goals*. Dalam *cooperative willingly*, diplomasi maritim kooperatif harus memiliki sifat kooperatif yang dilakukan secara sukarela. *Peaceful activities* merupakan kegiatan yang melibatkan aset maritim seperti kapal kepolisian maritim tanpa menggunakan kekerasan, sebaliknya digunakan untuk aktivitas yang bersifat damai seperti pertukaran personel angkatan laut, pertemuan kolaboratif hingga program pendidikan. Terakhir, *share common political goals* memiliki arah tujuan politik yang sama antara kedua pihak dengan membangun pengaruh, membangun koalisi atau aliansi hingga kepercayaan (Le Miere, 2014).

Tipe kedua adalah diplomasi maritim persuasif yang diartikan sebagai aktivitas diplomasi maritim yang ingin menunjukkan kapabilitas dan aset maritim yang dimiliki terhadap negara lain untuk meningkatkan pengakuan terhadap kekuatan maritim suatu negara, dimana sering kali dilakukan untuk membangun prestise internasional tanpa menggunakan kekuatan koersif. Terdapat tiga indikator dalam diplomasi maritim persuasif, yaitu *prestige building*, *No policies influence to another state* dan *effects may be unintentional*. Dalam *prestige building*, *'show of flag'* dilakukan menggunakan kapal angkatan laut untuk menunjukkan sinyal kehadiran dan kemampuan angkatan laut suatu negara untuk meyakinkan pihak lain bahwa armada laut negara tersebut hadir dan efektif. Pemberian sinyal tersebut dilakukan tanpa berusaha untuk mempengaruhi kebijakan negara lain atau *no policies influence to another state*. Pada indikator terakhir, *effects may be unintentional* dijelaskan bahwa perjalanan armada tersebut dilakukan untuk menanamkan rasa kehadiran kekuatan maritim terhadap pihak lain yang dampaknya mungkin tidak disengaja dikarenakan banyaknya aktor yang terlibat dan berpengaruh dan tidak dapat dihitung efek keseluruhan sehingga diindikasikan menjadi tidak sengaja (Le Miere, 2014).

Sementara diplomasi maritim koersif dilakukan dengan menggunakan ancaman atau kekuatan untuk memaksa lawan mencapai tujuan politik negara, sering kali melalui kapal perang atau kekuatan militer lainnya. Turner mendefinisikan sebagai penggunaan kekuatan angkatan laut tanpa perang untuk mencapai tujuan politik. Indikator dalam diplomasi koersif meliputi *Use of threat*, *state or non-state actor* dan *political goals*. Pertama, *use of threat* digunakan sebagai upaya ancaman kekuatan pada angkatan laut yang

terbatas atau adanya *limitation of force*. Tipe koersif ini juga meliputi aktor yang terlibat yaitu negara maupun non negara. Terakhir, *political goals* yang dibangun bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan aktor negara lain melalui cara paksaan maupun pencegahan perang (Le Miere, 2014). Setiap tipe diplomasi maritim memiliki peran dan pendekatan berbeda, disesuaikan dengan tujuan kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh suatu negara.

Klasifikasi tipologi dalam diplomasi maritim diperlukan untuk mengukur tensi internasional, sifat interaksi hingga penggunaan aset maritim. Tiap negara akan memiliki interpretasi yang berbeda dalam melihat sebuah aktivitas, hal ini mengarah pada intensi yang akan dirasakan oleh target diplomasi maritim. Dalam masing-masing tipologi, memperlihatkan adanya perbedaan tensi internasional yang dirasakan seperti dalam diplomasi maritim kooperatif melihat adanya ajakan Kerjasama. Diplomasi maritim persuasif melihat tensi sebagai pernyataan kekuatan, sedangkan bagi diplomasi maritim koersif dilihat sebagai ancaman untuk mempengaruhi kebijakan suatu negara. Sifat interaksi yang dilakukan juga berbeda, adanya sifat saling menguntungkan dalam diplomasi maritim kooperatif, penyampaian pesan secara sepihak tanpa adanya paksaan dalam diplomasi maritim persuasif atau bersifat menekan serta paksaan dalam diplomasi maritim koersif. Terakhir dalam penggunaan aset maritim, tiap tipologi menggunakan aset yang berbeda seperti halnya diplomasi maritim kooperatif dengan memfasilitasi adanya kerja sama, diplomasi maritim persuasif menunjukkan kapabilitas armada lautnya atau diplomasi maritim koersif yang menggunakan kapal perang untuk melakukan intimidasi terhadap lawan.

## METODE

Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan, memiliki tujuan dan fungsi untuk mendalami kejadian atau fenomena yang dirasakan oleh subjek penelitian seperti tindakan, persepsi dan dijabarkan secara deskripsi yang berbentuk frasa dan kata, dengan menggunakan bermacam-macam metode alamiah (Moleong, 2007). Penelitian kualitatif didefinisikan oleh John W. Creswell (2014) sebagai pendekatan untuk mengeksplorasi secara luas, menyeluruh dan mendalam. Christopher Lamont (2015) menjelaskan penelitian kualitatif didefinisikan dengan adanya upaya peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang sifatnya *non-numeric* dan memahami mengenai lingkungan internasional tempat aktivitas dan fenomena tersebut terjadi. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka yakni melalui artikel, jurnal ilmiah, pemberitaan media dan dokumen resmi pemerintah. Dokumen resmi pemerintah dalam artikel ini mencakup Annual Report yang dipublikasikan oleh *Department of Defense* serta Pasal-pasal yang berkaitan dengan transit passage dan aturan pelayaran internasional yang termuat dalam UNCLOS. Selain itu, beberapa portal media online juga dijadikan referensi pendukung yang berkaitan dengan pengiriman kapal perang Amerika Serikat di Selat Hormuz, insiden kejahatan di laut yang mengganggu pelayaran internasional hingga jumlah komoditas tertentu yang menggunakan jalur laut sebagai proses distribusinya. Ruang lingkup penelitian juga dibatasi dalam artikel ini, berfokus pada tahun 2019 hingga 2023 yang berkaitan dengan upaya diplomasi maritim koersif Amerika Serikat terhadap Iran di Selat Hormuz. Upaya diplomasi maritim koersif yang dianalisis melalui *freedom of navigation*. Teknik analisis data yang digunakan melalui Miles & Huberman (2011) yang melalui tiga tahapan, reduksi data, teknik pemaparan dan pengambilan keputusan dengan menarik kesimpulan di akhir. data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Relasi AS - Iran tahun 2015 - 2019

Amerika Serikat memiliki dugaan bahwa Iran melakukan pengembangan nuklir sehingga terbentuknya kerjasama kesepakatan nuklir yang tertuang pada *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA). Perundingan JCPOA bukan hanya melibatkan Amerika Serikat dengan Iran saja, tetapi juga diikuti oleh Perancis, Inggris, Rusia, Tiongkok dan Jerman sejak tahun 2015 (Pujayanti, 2019). JCPOA merupakan sebuah kesepakatan terhadap Iran dengan memberikan imbalan yaitu pencabutan sanksi atas penyalahgunaan senjata nuklir yang sedang dikembangkan. Di dalam kesepakatan ini, Iran akan menyetujui untuk pembatasan dan adanya pengawasan secara langsung oleh *International Atomic Energy Agency* (IAEA) terkait program pengembangan nuklir (Epstein M, 2015). Badan tersebut merupakan tim pemantau nuklir PBB yang dikhususkan untuk melihat situasi di Iran terkait pengembangan nuklirnya dan akan mencabut sanksi ekonomi lama apabila IAEA telah memberikan hasil verifikasi bahwa komitmen terkait nuklir sudah dipenuhi oleh Iran. Kesepakatan nuklir tersebut dilatarbelakangi oleh Tindakan Iran yang mengembangkan senjata nuklir yang diduga menjadi senjata pemusnah massal pada tahun 2011. Respon dan tindakan Iran yang masih bersikukuh untuk mengembangkan nuklirnya didasari oleh beberapa alasan. Kawasan Timur Tengah merupakan kawasan yang rentan dan penuh akan ketidakpastian, hal ini tentunya mendorong tiap-tiap negara yang berada pada *region* tersebut berusaha untuk melindungi kepentingan nasionalnya sendiri, Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kekuatan militer.

Kesepakatan nuklir tersebut dinilai menjadi wadah untuk mengurangi intensitas pengembangan nuklir milik Iran dengan pelaporan dari hasil pengawasan senjata nuklir Iran secara berkala oleh IAEA. Terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat memilih menerapkan kebijakan baru untuk menanggapi permasalahan nuklir Iran tersebut. Keinginan Trump untuk melakukan intervensi terhadap Iran rupanya terhalang dengan posisi Amerika Serikat berada dalam Kesepakatan Nuklir JCPOA tersebut. Hal ini dikarenakan negara yang terlibat dalam JCPOA tidak diizinkan untuk memberikan sanksi baru terhadap Iran ketika hasil pengawasan yang dilakukan IAEA menunjukkan hasil yang baik. Hal ini mengarah pada tindakan Trump untuk mengubah haluan posisi Amerika Serikat dalam JCPOA yang dirasa tidak sejalan dengan keinginannya.

*“The Iran Deal Was one of the worst and most one-sided transactions the United States has ever entered into”* (President Donald J. Trump dalam *Fact sheets*, 8 Mei 2018).

Di dalam *fact sheet* tersebut, Trump merasa partisipasi Amerika Serikat ke dalam JCPOA telah gagal melindungi kepentingan dari keamanan nasional Amerika. Selain itu, kesepakatan nuklir tersebut antara Amerika Serikat dengan Iran tidak menguntungkan. Seperti yang tertuang dalam *fact sheet* tersebut, uang yang diberikan oleh JCPOA yang semestinya digunakan untuk kepentingan domestik rakyat Iran, dialih fungsikan untuk mendanai kegiatan proksi terorisnya yaitu Hizbullah dan Hamas. Intelijen juga berhasil menemukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Iran dengan memalsukan mata uang Yaman. Hal ini dilakukan guna menciptakan ketidakstabilan di wilayah tersebut untuk membantu operasi Pasukan Quds yang merupakan satuan elit dari IRGC (The White House, 2018).

Sehingga, pada 8 Mei 2018, Amerika Serikat dibawah pimpinan Trump menarik diri secara sepihak dari kesepakatan nuklir JCPOA dan memberikan sanksi ekonomi berupa *Maximum Pressure* terhadap Iran (Satwika P, 2019). Bagi Trump, Amerika Serikat telah mematuhi komitmen sebagai negara anggota kesepakatan dari JCPOA tersebut, tetapi Iran dibawah rezim tersebut kerap melakukan tindakan yang mengganggu stabilitas keamanan kawasan khususnya Timur Tengah seperti teror, konflik hingga kekacauan. Dengan kemunculan tindakan Iran tersebut yang dianggap mengancam keamanan dan stabilitas baik bagi keamanan regional maupun keamanan internasional. Sanksi ekonomi yang diberikan diharapkan dapat melemahkan posisi Iran dan mengarah pada defisit negara sehingga tidak bisa melanjutkan program nuklir tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari sanksi tersebut yaitu jatuhnya nilai mata uang Iran senilai lebih dari 100% yang berdampak pada kenaikan harga barang secara signifikan.

Keamanan pelayaran Internasional di Selat Hormuz menjadi dampak dari sanksi yang diberikan AS. Muncul berbagai permasalahan baru yang membuka lebar konflik. Seperti halnya AS yang memasukkan IRGC sebagai kelompok teroris internasional yang membuat respon Iran semakin tegang. Selain itu, AS kerap menyalahkan Iran atas serangan terhadap kapal dagang dan kapal tanker minyak di sekitar Selat Hormuz yang diinisiasi oleh IRGC. Ketegangan semakin memburuk dengan terbunuhnya Jenderal Qassem Soleimani dari IRGC pada awal tahun 2020 (Congressional Research Service, 2020). Beberapa insiden tersebut memicu konflik yang berkelanjutan antara kedua pihak sehingga Iran enggan untuk melakukan pertemuan dengan AS untuk meredakan konflik yang sudah terjadi.

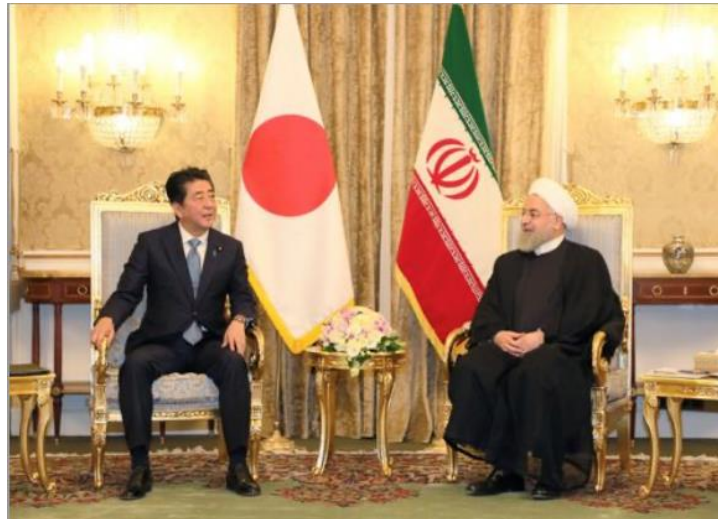
### **Pengaruh Eksternal dalam Proses Mediasi AS - Iran**

Sepanjang tahun 2019, komunikasi antara Amerika Serikat dan Iran mengenai krisis Selat Hormuz atau isu-isu lainnya tetap suram. Meskipun Presiden Trump beberapa kali menyatakan kesediaannya untuk berbicara dengan para pemimpin Iran, termasuk President Hassan Rouhani, tanpa prasyarat, Iran secara konsisten menolak tawaran tersebut. Iran bersikeras bahwa pencabutan sanksi ekonomi oleh AS adalah prasyarat mutlak sebelum pembicaraan apa pun dapat dimulai. Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, juga secara terbuka menolak negosiasi nuklir dengan Amerika Serikat, sebuah sikap yang konsisten mencerminkan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap AS (CRS Report, 2020). Pernyataan dari *National Iranian American Council* (NIAC) pada Juni 2019 menyoroti bagaimana pemerintahan Trump telah menghilangkan saluran komunikasi yang ada sebelumnya, yang semakin memperburuk situasi. Di sisi lain, tawaran AS untuk berdialog tanpa prasyarat seringkali disertai dengan daftar panjang tuntutan perubahan kebijakan dari Iran, seperti yang diuraikan oleh Menteri Luar Negeri AS Pompeo, yang membuat tawaran tersebut tampak tidak tulus di mata Iran (Center for Preventive Action, 2025).

Beberapa negara menjadi peran perantara dalam ketiadaan dialog secara langsung antara AS dengan Iran di antara lain seperti Oman, Jepang dan Swiss. Oman, merupakan negara yang berlokasi strategis dekat dengan Selat hormuz melakukan panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Mei 2019 dengan Sultan Qaboos bin Sa'id Al Sa'id sebagai pihak Oman untuk membahas ancaman Iran terhadap kawasan Teluk. Upaya dari Oman untuk meredakan ketegangan ini hanya mencapai pada penyampaian pesan daripada upaya mediasi pada 27 Juli 2019 yang membahas mengenai keamanan dan

kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Hal ini dikarenakan AS yang menuntut perubahan perilaku dari Iran dan Iran yang menuntut pencabutan sanksi ekonomi terlalu lebar untuk dijumpai (Reuters, 2019).

Jepang juga merupakan salah satu negara yang berupaya menjadi perantara pesan antara kedua pihak. Pada 12-14 Juni 2019, Shinzō Abe, Perdana Menteri Jepang mengunjungi Iran yang bertindak sebagai perantara AS dengan membawa pesan dari Trump untuk Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Kunjungan PM Jepang ke Iran diawali percakapan pada jamuan makan malam saat Trump mengunjungi Iran pada 6 Mei 2019. Sebagai sekutu dari AS, Jepang menjadi mediator untuk mengurangi ketegangan AS dengan Iran terlebih pasca penarikan diri AS dari kesepakatan nuklir JCPOA. Selain itu, kunjungan Jepang ingin melihat situasi dan kondisi stabilitas Timur Tengah terkait dengan pemberhentian impor minyak yang merupakan dampak dari sanksi AS (Reuters, 2019).



**Gambar 3.** Kunjungan Perdana Menteri Jepang, Shinzō Abe, pada 12 Juni 2019 di Iran.

Namun, upaya mediasi ini berakhir dengan kegagalan, dimana Ayatollah Khamenei secara eksplisit dan terbuka menolak untuk bertukar pesan dengan Trump. Ayatollah memberikan pernyataan yang dikutip melalui kantor berita frans, ia tidak melihat Trump layak untuk mendapatkan pertukaran pesan apapun dari Iran, begitupula Iran yang tidak memiliki jawaban apapun untuk sekarang maupun di masa mendatang. Penolakan keras ini terjadi bertepatan dengan serangan terhadap dua kapal tanker di Teluk Oman, salah satunya, *Kokuka Courageous*, adalah kapal tanker terkait Jepang. Insiden ini kemungkinan besar semakin merusak peluang keberhasilan diplomatik kunjungan Abe. (Kompas News, 2019).

Swiss dibawah kendali Menteri Luar Negeri Swiss, Ignazio Cassis, menyatakan kesediaan Swiss untuk bertindak sebagai perantara, namun bukan sebagai mediator kecuali ada permintaan dari kedua belah pihak. Pada awal Juni 2019, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengadakan konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Swiss, Ignazio Cassis. Dalam kesempatan tersebut, Pompeo menyatakan bahwa AS siap untuk terlibat dalam percakapan tanpa prasyarat dengan Iran. Swiss berperan aktif pada tahun 2019 sebagai perantara meskipun terbatas hanya dengan penyampaian pesan dibandingkan upaya diplomasi timbal balik dari Iran. Sehingga upaya Swiss juga dinilai gagal dalam meredakan ketegangan AS dengan Iran. (Aljazeera, 2019). Kegagalan yang dialami oleh beberapa negara untuk melakukan dialog maupun penyampaian pesan, mendorong AS untuk menjalankan diplomasi maritim sebagai upaya peredam konflik di Selat Hormuz.

### **Diplomasi Maritim Koersif Amerika Serikat di Selat Hormuz**

Dalam kerangka tipologi diplomasi maritim oleh Christian Le Miere, aktivitas dan bentuk operasi kebebasan navigasi FON yang dilaksanakan di bawah kendali *Department of Defense* (DoD) Amerika Serikat secara signifikan cenderung memenuhi ketiga indikator dari tipe diplomasi maritim koersif. Pemenuhan ini terlihat dari bagaimana FON melibatkan pengerahan aset militer yang terbatas, seperti kapal perang, yang berfungsi sebagai unjuk kekuatan dan kesiapan untuk menggunakan paksaan jika diperlukan. Kedua, operasi ini secara tegas dilakukan oleh aktor negara, yaitu angkatan laut Amerika Serikat dibawah DoD, dengan tujuan politik yang jelas untuk menentang klaim maritim negara lain yang dianggap berlebihan dan untuk memaksa kepatuhan terhadap interpretasi hukum internasional yang dianut oleh negara pelaksana FON, sehingga secara aktif berupaya mempengaruhi perilaku dan kebijakan negara sasaran.



### **Use of threat : Penggunaan kapal perang AS sebagai upaya intimidasi**

Sebagai indikator yang pertama menunjukkan adanya penggunaan ancaman yang dilakukan meskipun dengan kekuatan yang terbatas atau adanya *limitation of force*. Dalam FON ini, penggunaan kapal perang dan drone tanpa awak digunakan untuk melewati Selat Hormuz. Peningkatan kehadiran militer AS secara strategis di Selat Hormuz dan sekitarnya berfungsi sebagai bentuk pencegahan dan pemberian sinyal yang jelas kepada Iran. Dengan pengerahan kapal tersebut, dapat dilihat adanya kekuatan ancaman yang dilakukan melalui media kapal perang meskipun media tersebut dibatasi dalam kekuatannya seperti tidak boleh menimbulkan potensi peperangan ataupun konflik yang berkepanjangan.

Pada 16 Mei 2019, USS McFaul (DDG-74) dan USS Gonzalez (DDG-66) yang merupakan Kapal Perusak Berpeluru Kendali milik AS memasuki Selat Hormuz untuk melakukan transit menuju Teluk Persia melalui *transit passage* di Selat Hormuz tersebut. (USNI News, 2019). Kedua kapal tersebut menunjukkan bahwa lintasan transit tersebut bukan didominasi oleh suatu negara saja melainkan kapal dari seluruh negara diperbolehkan melintasi untuk keperluan transit.

Transit kapal induk AS melalui Selat Hormuz pada 19 November 2019, USS Abraham Lincoln (CVN-72) dan Carrier Strike Group termasuk USS Leyte Gulf CG-55, USS Farragut DDG-99, transit melalui Selat Hormuz ke Teluk Persia untuk pertama kalinya sejak penempatan di tengah ketegangan dengan Iran (United States Navy, 2019). Disusul pada 4 Desember 2019, USS Abraham Lincoln (CVN-72) dan Carrier Strike Group termasuk USS Leyte Gulf dan USS Farragut kembali melakukan demonstrasi transit damai dari arah Teluk Persia menuju Selat Hormuz. Pada transit tersebut, pihak Angkatan Laut Iran melalui IRGCN melakukan pengerahan 18 kapal kecil dalam jarak dekat untuk mengawasi aktivitas yang dilakukan oleh USS Abraham Lincoln (U.S Navy Website, 2019). USS Georgia (SSGN-729) yang merupakan kapal selam rudal jelajah dikawal oleh USS Port Royal (CG-73) dan USS Philippine Sea (CG-58) melintasi wilayah transit passage Selat Hormuz pada 21 Desember 2020 (U.S Navy Website, 2020).

Pengiriman kapal perang AS ini digunakan sebagai unjuk kekuatan melalui ancaman terbatas dan menunjukkan kemampuan beroperasi di wilayah transit yang sesuai dengan hukum internasional UNCLOS. USS Monterey, USS Iwo Jima, USS Portland serta USS Essex melakukan patroli dalam mengupayakan diplomasi maritim melalui media kapal perang di Selat Hormuz pada tahun 2021. Patroli FON dilakukan kembali pada 20 Juni 2022, melintasi *transit passage* menggunakan USS Sirocco (PC-6) yang merupakan Kapal Patroli Pantai beserta USNS Choctaw County (T-EPF-2) yang merupakan Kapal Transportasi Cepat. Ketiga kapal tersebut dihadapi dengan penentangan dari kapal Iran dan mengganggu pelayaran transit yang dilakukan. Hal ini dilansir menurut Wakil Laksamana Brad Cooper, Komandan Armada Kelima AS dalam CBS News tahun 2022, yang menjelaskan bahwa interaksi antara kapal IRGCN dengan kapal AS dilangsungkan melalui jarak dan peringatan bunyi yang keras. (The presidential, 2022)

*“One of the IRGCN vessels approached Sirocco head-on at a dangerously high speed and only altered course after the U.S. patrol coastal ship issued audible warning signals to avoid collision. The Iranian vessel also came within 50 yards of the U.S. Navy ship during the interaction, and Sirocco responded by deploying a warning flare”*(Vice Admiral Brad Cooper, the Fifth Fleet’s commander dalam CBS News)

Ketegangan antara kapal AS dengan Kapal IRGCN tersebut dalam pernyataan lanjutannya menghadapi interaksi penuh selama kurang lebih satu jam dan diakhiri dengan kepergian kapal IRGCN dari area tersebut. Hal ini menunjukkan upaya pengiriman kapal perang sebagai upaya intimidasi terhadap kapal IRGCN milik Iran. Kapal transportasi cepat AS atau EPF memiliki kecepatan 35 knot dan dapat mengangkut 600 ton pendek kargo militer. Selain itu, USS Sirocco memiliki spesifikasi Panjang 178 meter, dengan kecepatan 32 knot serta dilengkapi senjata 2 peluncur granat dan 2 senapan mesin. (United States Navy, 2015). Sedangkan kapal milik IRGCN hanya memiliki spesifikasi rata-rata panjang sekitar 17,3 meter, bobot 14 ton dan hanya dapat mengangkut awak kapal 3 orang. Namun karena merupakan kapal kecil, kecepatan maksimal dapat mencapai 52 knot sehingga mudah untuk melakukan manuver dan perpindahan cepat. (Navypedia, 2025).

Pada tahun 2023, kehadiran dan patroli Angkatan Laut AS di Selat Hormuz meningkat, terutama sebagai respons terhadap serangkaian penyitaan kapal komersial oleh Iran. Pada 19 April 2023, patroli FON pertama kalinya mengerahkan kapal drone US Navy melalui Selat Hormuz, menggunakan L3 Harris Arabian Fox MAST-13 (Kapal Drone USV) yang dikawal oleh USCGC Charles Moulthrop (WPC-1141) serta USCGC John Scheuerman (WPC-1146). Tujuan dari penggunaan drone adalah untuk menunjukkan kekuatan ancaman yang terbatas pada USV serta meningkatkan kesadaran kekuatan maritim. (U.S Department of Defense, 2023). USS Paul Hamilton (DDG-60) yang merupakan Kapal Perusak Berpeluru Kendali melintasi Selat Hormuz pada 19 Mei 2023. Patroli FON tersebut dilakukan untuk menjaga jalur

pelayaran Internasional serta mencegah agresi Iran lebih lanjut dan untuk menjamin kebebasan navigasi bagi kapal-kapal komersial yang melintasi jalur perairan penting ini. (Jon Gambrel, 2023).

Dilansir melalui Reuters (2023), Pada bulan Juli 2023, USS McFaul secara aktif mencegah upaya Iran untuk menyita dua kapal tanker di perairan internasional di Teluk Oman, yang terletak di tenggara Selat Hormuz. Insiden ini berawal pada upaya Iran untuk menyita kapal tanker minyak milik Marshall Islands dan Bahama di Teluk Oman yang dekat dengan Selat Hormuz. Kehadiran USS McFaul pada insiden tersebut membuat Iran memberikan tembakan panjangan terhadap kedatangan kapal AS menurut pernyataan dari Komando Pusat AS. Tembakan tersebut mengenai bagian lambung kapal tanker namun tidak ada korban jiwa maupun kerusakan yang ditimbulkan. Reuters menambahkan, Iran memberikan tanggapan jika mereka berhak untuk mengklaim perintah pengadilan untuk menyita kapal tanker asing yang melewati pelayaran Internasional tersebut. Meski Iran melakukan klaim, kehadiran kapal AS membuat Iran untuk pergi dan meninggalkan area serta insiden penyitaan (Reuters, 2023).

Transit Kelompok Tempur Kapal Induk USS Dwight D. Eisenhower melalui Selat Hormuz pada November 2023 juga merupakan demonstrasi penting dari kehadiran dan kemampuan AS di kawasan tersebut. Transit ini melibatkan kapal induk USS Dwight D. Eisenhower yang merupakan kapal penjelajah berpeluru kendali USS Philippine Sea, kapal perusak berpeluru kendali USS Gravelly dan USS Stethem, serta kapal perusak Angkatan Laut Prancis FS Languedoc, menunjukkan komitmen AS dan sekutunya terhadap kebebasan perdagangan, keamanan regional, dan kebebasan navigasi (US Naval Central Command Public Affairs, 2023).



**Gambar 4.** USS Dwight D. Eisenhower melalui Selat Hormuz pada 2023

#### ***State or non-state actor: Department of Defense sebagai Aktor Utama***

Dalam diplomasi kapal perang serta diplomasi maritim koersif, penting untuk melihat aktor siapa yang terlibat dalam suatu aktivitas. Indikator kedua dalam diplomasi maritim koersif adalah penggunaan aktor yang terlibat, FON secara eksplisit menggunakan aktor negara untuk mengerahkan aktivitas kebebasan bernavigasi dibawah kendali *Department of Defense* melalui angkatan lautnya. Di sisi lain, negara lawan yakni Iran juga menggunakan aktor negara melalui Angkatan Laut Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGCN untuk merespon tindakan diplomasi maritim AS melalui *speech act* petinggi maupun insiden gangguan stabilitas di Selat Hormuz.

Departemen pertahanan AS memiliki wewenang dan berhak untuk mengoperasikan suatu upaya kebebasan navigasi di suatu wilayah untuk memenangi klaim berlebihan atau dominasi suatu negara terhadap wilayah laut internasional. Program dari DoD itu sendiri direncanakan secara baik dan setiap tahunnya departemen Menyusun laporan FON fiscal tahunan yang dipublikasikan di situs web resmi Departemen pertahanan untuk menunjukkan sikap transparan. Laporan tahunan itu berisi operasi yang sudah dilakukan oleh pasukan Angkatan laut AS sepanjang tahun tersebut serta identifikasi terhadap negara pesisir tertentu yang melakukan klaim berlebihan pada rentang tahun tersebut. Pada kasus ini merupakan penentangan klaim berlebihan dan ancaman dari Iran untuk menutup perairan internasional. (U.S Department of Defense, 2017).

Pertemuan kedua aktor dalam diplomasi maritim di Selat Hormuz dilakukan melalui aset-aset maritim, dalam operasi ini adalah kapal perang AS serta kapal milik IRGCN. Pertemuan sepanjang tahun 2019 hingga 2023 ini melibatkan kapal-kapal IRGCN yang mendekati kapal-kapal AS dengan kecepatan tinggi dan dalam jarak yang dekat. Angkatan Laut AS melaporkan banyak insiden di mana kapal-kapal IRGCN melakukan manuver tidak aman selama transit rutin kapal-kapal AS melalui Selat Hormuz Manuver-manuver ini dijelaskan dengan adanya tindakan kapal milik IRGCN yang melaju langsung ke arah kapal-kapal AS dan mendekat dalam jarak berbahaya. Dalam beberapa insiden, kapal-kapal IRGCN menggunakan laser untuk menyoroti pesawat militer AS, seperti helikopter serang AH-1Z Viper, saat

melakukan operasi rutin di wilayah udara internasional di Teluk Arab ICMES 2023). Tindakan ini dianggap provokatif dan berpotensi membahayakan awak pesawat AS. Angkatan Laut AS juga melaporkan beberapa kasus di mana kapal-kapal IRGCN mencoba menyita kapal komersial yang berlayar melalui Selat Hormuz.

### **Political goals : Kepentingan Amerika Serikat dalam menjamin akses perdagangan minyak di Selat Hormuz**

Sebagai indikator terakhir dalam diplomasi maritim koersif yang berbeda dengan diplomasi maritim persuasif, di mana persuasif tidak memiliki arah tujuan yang jelas untuk mengubah dan mempengaruhi kebijakan negara lawan karena terfokus pada *prestige building* dan menunjukkan kapabilitas dan kemampuan yang dimiliki oleh angkatan laut negara tersebut (Le Miere, 2014). Dalam diplomasi maritim koersif, memiliki arah tujuan politik yang jelas dalam menjalankan aktivitas tersebut. Tujuan utama Amerika Serikat dalam diplomasi maritim koersifnya di Selat Hormuz adalah untuk memastikan kebebasan navigasi dalam pelayaran Internasional di Selat Hormuz (U.S Department of Defense, 2019). Kebebasan navigasi tersebut berimplikasi terhadap keamanan perdagangan maritim. Hal ini juga mendorong adanya perubahan perilaku negara dari Iran untuk meredam ancaman penutupan Selat Hormuz sebagai pelayaran internasional menjadi pelayaran domestik.

Pernyataan berulang dari Wakil Laksamana Komando Pusat Angkatan Laut AS, Brad Cooper, melalui CENTCOM (2023), bahwa pasukan angkatan laut AS akan meningkatkan keamanan patroli di selat Hormuz dengan melakukan Kerjasama dengan mitra regional. Dengan Kerjasama ini diharapkan adanya peningkatan kesadaran akan konflik yang terus hadir di selat kritis tersebut. Ia menambahkan adanya penghentian dari pihak Iran untuk mengganggu stabilitas keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Mengingat pentingnya selat ini sebagai akses jalur transit utama untuk pengiriman energi global, AS memiliki kepentingan strategis untuk mencegah gangguan apa pun yang dapat mempengaruhi ekonomi global. Tercatat saat terjadi penembakan jatuh drone Amerika oleh Iran pada 2019, harga minyak menjadi meningkat tepat satu hari setelahnya. Hal ini terlihat pada Benchmark West Texas Intermediate (WTI) naik sebesar 6,8% dan minyak mentah internasional Brent naik sebesar 4,6%. Kenaikan harga minyak per barel juga terjadi yang sebelumnya \$65,08 per barel meningkat menjadi \$65,44 per barel selang dua hari setelahnya pada minyak mentah Brent. WTI juga mengalami kenaikan sebesar 0,5 % pada harga per barelnya menjadi \$59,11 yang sebelumnya \$58,80 per barel. Situasi kenaikan harga minyak membuat keadaan pasar ekonomi global menjadi tidak stabil, sehingga FON bertujuan untuk mencapai kepentingan Amerika dalam akses perdagangan di Selat Hormuz .(Sayin, 2020).

Tindakan AS, termasuk kehadiran angkatan laut, patroli, dan dukungan terhadap inisiatif keamanan multinasional, mencerminkan komitmen yang teguh terhadap tujuan ini. Kehadiran angkatan laut AS yang berkelanjutan dan operasi di Selat Hormuz berfungsi sebagai demonstrasi kekuatan yang dimaksudkan untuk mencegah Iran dari mengambil tindakan yang akan semakin meningkatkan ketegangan atau memajukan program nuklirnya dengan cara yang mengancam kepentingan AS dan sekutunya. Dominasi negara dan klaim berlebihan dalam wilayah perairan internasional tidak diinginkan terjadi terlebih di jalur pelayaran perdagangan yang strategis sehingga AS dibawah komando Departemen pertahanan berupaya menggunakan aset maritim melalui pengiriman kapal perang untuk menekan ketegangan yang ada di kawasan tersebut.

### **Hasil dari Diplomasi Maritim Koersif di Selat Hormuz**

Diplomasi maritim koersif Amerika Serikat di Selat Hormuz selama periode 2019-2023 merupakan periode aktivitas yang intens dan ketegangan yang tinggi. AS menggunakan peningkatan kehadiran militer dengan pengiriman kapal perang melalui Departemen pertahanan untuk mencapai tujuan politiknya di kawasan itu. Tindakan-tindakan ini merupakan respons terhadap Iran dalam ancaman untuk menutup Selat Hormuz, serangan terhadap kapal tanker, dan penyitaan kapal. AS berusaha untuk memastikan kebebasan navigasi, menanggapi ancaman Iran, membangun koalisi maritim internasional dan menjaga stabilitas perdagangan minyak dunia. Penggunaan ancaman melalui kapal perang AS dilakukan melalui FON yang melibatkan aktor negara Departemen Pertahanan AS dengan tujuan politik yang jelas yaitu menjaga stabilitas perdagangan minyak, meminimalisir klaim berlebihan dari Iran serta menekan ancaman yang diberikan oleh Iran yang berupaya menutup akses Selat Hormuz bagi kapal asing.

Tujuan utama *Freedom of navigation* milik Amerika Serikat di Selat Hormuz adalah untuk mencegah agresi Iran dan memastikan arus perdagangan terhadap minyak dan gas. (U.S Department of Energy, 2023). Meskipun kehadiran Angkatan Laut AS yang kuat dan upaya aktif untuk mencegah penyitaan kapal tanker Iran, sejumlah insiden terus terjadi sepanjang tahun pelaksanaan tersebut. Iran terus melakukan tindakan-tindakan sebagai tantangan terhadap dominasi maritim AS yang cenderung menyimpulkan bahwa kegiatan diplomasi maritim AS dianggap kurang berhasil.

Beberapa faktor mungkin berkontribusi pada dugaan kegagalan FON Amerika Serikat untuk sepenuhnya mencegah tindakan Iran di Selat Hormuz pada tahun 2023. Ketegangan yang sudah berlangsung lama membuat minimnya komunikasi antar kedua negara sehingga sikap Iran yang cenderung tidak ingin membalas pesan-pesan yang tersampaikan oleh AS menghambat tujuan stabilitas keamanan dan perdagangan di Selat Hormuz. (Riva R, 2024). Kemampuan Iran dalam penggunaan kapal cepat, ranjau laut, dan rudal anti-kapal memberikan sarana untuk menantang superioritas angkatan laut AS di selat tanpa terlibat dalam perang konvensional langsung.

Dominasi kekuatan Iran dalam mengganggu stabilitas atas bentuk respon dari sanksi ekonomi yang diberikan AS tidak dapat dibendung melalui diplomasi maritim. Hal ini dikarenakan, Penyampaian pesan melalui asset militer yang disampaikan juga terbatas tergantung pada interpretasi negara penerima. Kegagalan diplomasi maritim koersif AS untuk sepenuhnya efektif menghadapi Iran juga berakar pada adanya *limitation of force* atau keterbatasan penggunaan kekuatan dalam konteks ini, terutama saat dihadapkan pada strategi asimetris Iran. AS mengandalkan proyeksi kekuatan melalui aset-aset militer seperti kapal induk, Namun adanya keterbatasan inheren dalam diplomasi maritim dimana pergerakan yang dilakukan dibatasi untuk menghindari adanya perang yang terjadi yang mengarah pada kegagalan dari diplomasi maritim tersebut.

## KESIMPULAN

Konflik yang terjadi di Selat Hormuz pada tahun 2019 hingga 2023 dilatarbelakangi oleh keputusan Amerika Serikat untuk keluar dari kesepakatan JCPOA pada tahun 2018 dan menerapkan Kembali sanksi ekonomi melalui *maximum pressure* terhadap Iran. Sanksi yang diberikan sangat berdampak terhadap perekonomian Iran yang membuat adanya respon Iran untuk melakukan *bargaining position* dengan Selat Hormuz. Tawar menawar yang dilakukan diawali dengan ancaman untuk menutup akses pelayaran di Selat Hormuz yang tentunya akan mengganggu perdagangan minyak global. Iran akan membuka kembali akses selat tersebut asalkan AS mau menghentikan pemberian sanksi ekonomi yang salah satunya adalah penghentian impor minyak Iran bagi banyak negara.

Upaya mediasi menjadi cara untuk meminimalisir konflik yang dilakukan oleh beberapa negara seperti Jepang, Oman hingga Swiss. Meski begitu, mediasi dan penyampaian pesan tidak berjalan dengan baik. Sehingga, mendorong AS untuk mengimplementasikan strategi diplomasi maritim koersif yang bertujuan untuk menjaga kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Upaya diplomasi maritim koersif dilakukan melalui Freedom of Navigation melalui asset maritim kapal perang Angkatan laut serta melibatkan aktor negara yaitu *Department of Defense*. Tujuan politik yang ingin dicapai AS adalah untuk mendorong Iran mengubah perilakunya dalam ancaman penutupan Selat Hormuz, menghentikan aktivitas yang dianggap mengganggu stabilitas pelayaran Internasional, dan memastikan kelancaran arus lalu lintas perdagangan minyak global yang melalui selat tersebut.

Amerika Serikat telah melakukan diplomasi maritim sepanjang tahun 2019 hingga 2023 dengan dengan pengiriman kapal dengan kekuatan ancaman terbatas cenderung menunjukkan kegagalan dalam mencapai tujuan politik sepenuhnya. Peralnya, insiden kerap terjadi oleh ICGC dengan melakukan penyitaan kapal, gangguan kapal dagang yang melintas hingga penembakan drone menunjukkan AS belum berhasil mencegah perilaku Iran dalam ancaman penutupan Selat Hormuz. Kegagalan yang dialami didasarkan pada ketegangan antar kedua negara yang sudah berlangsung lama, minimnya komunikasi serta taktik Iran dalam menggunakan kapal cepat untuk mengganggu jalur transit Internasional tersebut. Sikap Iran yang tidak terbuka dan enggan membuat kesepakatan lanjutan dengan AS membuat diplomasi maritim tidak efektif dalam mengurangi gangguan kapal yang melintas maupun ancaman dari penutupan Selat Hormuz

Amerika Serikat sebagai negara adidaya, perlu untuk memahami konsekuensi dari tindakan strategisnya guna menghindari dampak yang tidak diinginkan. Peralnya, Iran sebagai negara lawan yang ditekan melalui sanksi ekonomi sudah beradaptasi dengan tatanan global dengan memanfaatkan peluang posisi strategis Selat Hormuz sebagai ancaman bagi komoditas minyak Amerika Serikat. Keberhasilan yang dibayangkan oleh AS dari keluarnya kesepakatan JCPOA dan menerapkan sanksi ekonomi yang baru, nyatanya menjadi bumerang yang nyata untuk melakukan kebijakan lainnya guna menghadapi ancaman akses Selat Hormuz yaitu dengan diplomasi maritim koersif untuk mengembalikan stabilitas pelayaran internasional. Kerugian penutupan Selat Hormuz bukan hanya berdampak pada Amerika Serikat saja, melainkan kedepannya akan berdampak pada negara lainnya dalam keperluan transit hingga distribusi minyak, sehingga membuat adanya instabilitas dalam keamanan maupun pasar ekonomi global.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aceves, W. J. (1993). Diplomacy at Sea: U.S. Freedom of Navigation Operations in the Black Sea. *Naval War College Review*, 46(2), 59–79.
- Aljazeera News. (2019, April 28). *Iran: Business as usual in Strait of Hormuz after blacklisting*. <https://www.aljazeera.com/news/2019/4/28/iran-business-as-usual-in-strait-of-hormuz-after-blacklisting>
- Barrington, L. (2023, Juli 6). *US Navy says it prevented Iran from seizing tankers in Gulf of Oman*. Reuters News. <https://www.reuters.com/world/middle-east/shots-fired-oil-tanker-gulf-maritime-security-bodies-2023-07-05/>
- BBC News. (2019, April 24). *Amerika Serikat sasar negara-negara pengimpor minyak Iran*. BBC. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-48005119>
- Cable, J. (2016). *Gunboat Diplomacy, 1919-79: Political Applications of Limited Naval Force*. Springer.
- Cable, J. (1994). The future of gunboat diplomacy. In *Gunboat Diplomacy 1919–1991: Political Applications of Limited Naval Force* (pp. 140-157). London: Palgrave Macmillan UK.
- Center for Preventive Action. (2025, April 23). *Confrontation With Iran | Global Conflict Tracker*. Council on Foreign Relations. <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/confrontation-between-united-states-and-iran>
- Christopher Lamont. 2015. *Research Methods in International Relations*. London: Sage.
- Congressional Research Service. (2020, May 8). *U.S.-Iran Conflict and Implications for U.S. Policy | Congress.gov | Library of Congress*. Congress.gov. <https://www.congress.gov/crs-product/R45795>
- Defense Technical Information Center. (n.d.). *Iran's Challenge to the U.S. in the Maritime Domain*. DTIC. <https://apps.dtic.mil/sti/citations/trecms/AD1164412>
- Department of Defense. (n.d.). *DOD Releases Fiscal Year 2023 Freedom of Navigation Report*. US Department of Defense. <https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3769479/dod-releases-fiscal-year-2023-freedom-of-navigation-report/>
- Epstein, J. M. (2022, July 22). *Implications of the Iran Accord for the Maritime Industry*. Holland & Knight. <https://www.hkllaw.com/en/insights/publications/2015/07/implications-of-the-iran-accord-for-the-maritime-i>
- Etzioni, A. (2016). Freedom of navigation assertions: The United States as the world's policeman. *Armed Forces & Society*, 42(3), 501-517.
- Gambrell, J. (2023, May 19). *US and allied naval commanders in Mideast transit Strait of Hormuz, in show of force against Iran*. <https://apnews.com/article/iran-us-navy-strait-of-hormuz-persian-gulf-tensions-63ac622781b97d7fa578f440bd074f64>
- Ghaddar, A., & Fenton, S. (2023, October 20). *Strait of Hormuz: the world's most important oil artery*. Reuters. <https://www.reuters.com/business/energy/strait-hormuz-worlds-most-important-oil-artery-2023-10-20/>
- Global Conflict Tracker. (n.d.). *Confrontation With Iran | Global Conflict Tracker*. Council on Foreign Relations. <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/confrontation-between-united-states-and-iran>
- Gorshkov, S. G. (1977). The Sea power of the state. *Survival*, 19(1), 24–29. <https://doi.org/10.1080/00396337708441659>
- Hawkins, W. R. (1988). Strategy and “Freedom of Navigation”. *The National Interest*, 12, 48–56.
- Holsti, K. J. (1984). *International Politics, A Framework for Analysis*. Prentice-Hall Englewood Cliffs, NJ.
- ICC Commercial Crime Services. (2023). *New IMB report reveals concerning rise in maritime piracy incidents in 2023*. ICC. <https://icc-ccs.org/new-imb-abc-report-reveals-concerning-rise-in-maritime-piracy-incidents-in-2023/>
- Indonesia Center for Middle East Studies. (2023, September 29). *Rangkuman Berita Utama Timteng Jumat 29 September 2023*. ICMES. <https://ic-mes.org/news/al-irgc-sorotkan-sinar-laser-ke-helikopter-serang-milik-al-as-di-teluk-persia/>
- JNS News. (2019, April 29). *Iran threatens to close Strait of Hormuz shipping route*. <https://www.jns.org/iran-threatens-to-close-strait-of-hormuz-shipping-route/>
- John W. Creswell. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: Sage.p 4.
- Kompas News. (2019, June 13). *Temui PM Jepang, Pemimpin Tertinggi Iran: Saya Tidak Punya Pesan untuk Trump*. Kompas News International. <https://internasional.kompas.com/read/2019/06/13/19360611/temui-pm-jepang-pemimpin-tertinggi-iran-saya-tidak-punya-pesan-untuk>
- Lagrone, S. (2019, May 16). *Two U.S. Warships Enter Persian Gulf Without Incident*. U.S Naval Institue. <https://news.usni.org/2019/05/16/two-u-s-warships-enter-persian-gulf-without-incident>
- Le Mière, C. (2014). *Maritime diplomacy in the 21st century: Drivers and challenges*. Routledge.

- Lexy J Moleong. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Matthew Miles and Michael Huberman. (2011). "Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data," dalam *Pengenalan Data Kualitatif*.
- Navy Pedia. (n.d.). *PEYKAAP II*. navypedia. [http://www.navypedia.org/ships/iran/iran\\_cf\\_pekkaapii.htm](http://www.navypedia.org/ships/iran/iran_cf_pekkaapii.htm)
- Nugraha, M. H. R., & Sudirman, A. (2016). Maritime Diplomacy Sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia. *Jwp (Jurnal Wacana Politik)*, 1(2).
- Odell, R. (2019). *How strategic norm-shaping undergirds America's command of the commons* (MIT Political Science Department Research Paper No. 2019-23).
- Paramasaty, S., & Wiranto, S. (2019, Desember). Konfrontasi Amerika Serikat dan Iran dalam Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). *Jurnal Hubungan Internasional*, XII(2).
- Pujayanti, A. (2019, Mei). *SENGKETA NUKLIR IRAN – AMERIKA SERIKAT*. KAJIAN SINGKAT TERHADAP ISU AKTUAL DAN STRATEGIS INFO DPR SINGKAT. [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XI-10-II-P3DI-Mei-2019-179.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-10-II-P3DI-Mei-2019-179.pdf)
- Rahim, M. H. (2020, Juli 29). Diplomasi Koersif Amerika Serikat terhadap Iran pasca Pengunduran Diri Amerika Serikat dari *Joint Comprehensive Plan of Actions*. Tesis.
- Ramadhani, R., & Marzaman, A. (2024, December 30). *MARITIME STABILITY IN THE STRAIT OF HORMUZ: CHALLENGES, GLOBAL IMPACTS, AND MULTILATERAL DIPLOMACY*. Journal of Social Sciences. <https://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/hypothesis/article/view/1293/1391>
- Reuters. (2019, Juli 27). *Oman's top diplomat in Iran talks amid mounting Gulf tensions*. Reuters News. <https://www.reuters.com/article/world/oman-s-top-diplomat-in-iran-talks-amid-mounting-gulf-tensions-idUSL8N24S094/>
- Rothwell, D. R., & Bateman, W. W. S. G. (Eds.). (2000). *Navigational rights and freedoms, and the new law of the sea* (Vol. 35). Martinus Nijhoff Publishers.
- Rowlands, K. (2018). *Naval diplomacy in 21st century: A model for the post-cold war global order*. Routledge.
- Sayin, Y., & Kilic, F. (2020, Januari). *THE STRAIT OF HORMUZ AND IRAN'S INTERNATIONAL RELATIONS*. Eurasian Research Journal.
- Sharafedin, B. (2019, Juni 14). *Iranian leader tells Japan's Abe Trump 'not worthy' of a reply to message*. Reuters news. <https://www.reuters.com/article/world/iranian-leader-tells-japans-abe-trump-not-worthy-of-a-reply-to-message-idUSKCN1TE14V/>
- Sugiharto, A., & Shafwatullah, P. (2021, April 09). Maritime Diplomacy in Building Maritime National Security in Indonesia. *Jurnal Maritim Indonesia*, 9(2).
- Sinai, J. (2004). Future Trends in Worldwide Maritime Terrorism. *Connections: The Quarterly Journal*. 3(1), 49-66.
- Tendulkar, C. (2023). Freedom of navigation under United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982. *Indian Journal of Law and Legal Research*, 5(4).
- The Presidential Prayer Team. (2022, June 22). *Iranian Vessels Challenge U.S. Navy Ships*. <https://www.presidentialprayerteam.org/2022/06/22/iranian-vessels-challenge-u-s-navy-ships/>
- Trump, D. J. (2018, May 8). *President Donald J. Trump is Ending United States Participation in an Unacceptable Iran Deal – The White House*. Trump White House Archives. <https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-ending-united-states-participation-unacceptable-iran-deal/>
- United Nations Convention on the Law of the Sea. (n.d.). *UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA*. the United Nations. [https://www.un.org/depts/los/convention\\_agreements/texts/unclos/part3.htm](https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/part3.htm)
- United States Navy. (2025, Maret 21). *Expeditionary Fast Transport (EPF)*. America's Navy. <https://www.navy.mil/Resources/Fact-Files/Display-FactFiles/Article/2226179/expeditionary-fast-transport-epf/>
- United States Navy. (2019, November 19). *Abraham Lincoln Carrier Strike Group Transits the Strait of Hormuz*. America's Navy. <https://www.navy.mil/Resources/Photo-Gallery/igphoto/2002213447/>
- United States Navy. (2020, Desember 21). *USS Georgia Transits Strait of Hormuz*. America's Navy. <https://www.navy.mil/Press-Office/News-Stories/Article/2453181/uss-georgia-transits-strait-of-hormuz/>
- U.S. Naval Forces Central Command Public Affairs. (2023, Mei 12). *U.S. to Increase International Coordination, Presence in Strait of Hormuz*. CENTCOM News. <https://www.centcom.mil/MEDIA/NEWS-ARTICLES/News-Article-View/Article/3394180/us-to-increase-international-coordination-presence-in-strait-of-hormuz/>

- UN Trade and Development. (n.d.). *RMT 2024 -Chapter I. International maritime trade*. UNCTAD. Retrieved April, 2025, from [https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2024ch1\\_en.pdf](https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2024ch1_en.pdf)
- US Energy Information Administration. (n.d.). *World Oil Transit Chokepoints*. International - U.S. Energy Information Administration (EIA). Retrieved April, 2025, from [https://www.eia.gov/international/analysis/special-topics/World\\_Oil\\_Transit\\_Chokepoints](https://www.eia.gov/international/analysis/special-topics/World_Oil_Transit_Chokepoints)
- U.S Department of Defense. (2024, May 8). *DOD Releases Fiscal Year 2023 Freedom of Navigation Report*. Department of Defense. <https://policy.defense.gov/Portals/11/DoD%20FON%20Program%20Summary%2016.pdf?ver=2017-03-03-141350-380>
- U.S Department of Defense. (2023, April 19). *Unmanned Surface Vessel Transits Strait of Hormuz with U.S. Coast Guard*. Dvids. <https://www.dvidshub.net/image/7748236/unmanned-surface-vessel-transits-strait-hormuz-with-us-coast-guard>
- U.S Department of Energy. (2023, November 21). *The Strait of Hormuz is the world's most important oil transit chokepoint - U.S. Energy Information Administration*. EIA. Retrieved 2025, from <https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=61002>
- U.S. Naval Forces Central Command Public Affairs. (2023, November 27). *IKE Strike Group Transits the Strait of Hormuz*. U.S. Fleet Forces Command. Retrieved 2025, from <https://www.usff.navy.mil/Press-Room/News-Stories/Article/3598576/ike-strike-group-transits-the-strait-of-hormuz/>
- U.S Navy. (2015, September 09). *Sirocco (PC-6)*. Naval History and Heritage Command. <https://www.history.navy.mil/research/histories/ship-histories/danfs/s/sirocco--pc-6-.html>
- Widén, J. J. (2011). Naval diplomacy—a theoretical approach. *Diplomacy & Statecraft*, 22(4), 715-733.